

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Affan Gaffar, 2005, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ahmad Ubaidillah dan Abdul Rozak, 2000, *Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatukkah, Jakarta.
- B. Hestu Cipto Handoyo, 2015, *Hukum Tata Negara Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Didik Supriyanto, Veri Junaidi, dan Devi Darmawan, 2012, *Penguatan Bawaslu Optimalisasi Posisi, Organisasi, dan Fungsi dalam Pemilu 2014*, Perkumpulan Untuk Demokrasi dan Pemilu, Jakarta.
- Fajlurrahman Jurdi. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana. Jakarta.
- Fritz Edward Siregar, 2020, *Dimensi Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Hani Adhani, 2019, *Sengketa Pilkada Penyelesaian Dari Mahkamah Agung Ke Mahkamah Konstitusi*, PT.Grafindo Persada, Depok.
- Inu Kencana Syafiie, 2011, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, PT Alumni, Bandung.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian hukum : Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Jay A. Sigler, et. all., 1977, *The Legal Sources of Public Policy*, Lexington Books, Lexington.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta.
- , 2002, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Ke Empat*, Depok: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, 1988, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ni'matul Huda. 2010. *Ilmu Negara*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. Balai Pustaka, Jakarta.
- Ratna Dewi Petalolo. 2019. *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019*. Jakarta.

- Rusadi Kantaprawira, 1998, *Makalah: Hukum dan Kekuasaan*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunarto, 2015, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Kencana, Jakarta.
- Yuswalina dan Kun Budiarto, 2016, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Zulkarnaen dan Beni Ahmad Saebani, 2012, *Hukum Konstitusi*, Pustaka Setia, Bandung.

JURNAL

- Adam Muhshi dan Fenny Tria Yunita, Karakter Yuridis Putusan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Call Paper Konferensi HTN Ke-5, Batusangkar, Sumatera Selatan, 2018.
- Ateng Syafruddin. Bandung. "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", Jurnal Pro Justitia Edisi IV, Universitas Parahyangan. 2000.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum, *Dugaan Pelanggaran pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020*, Bagian TLP Biro TP3 Bawaslu Republik Indonesia, 7 Februari 2021
- Jaya Hasilohan Limbong", Penindakan pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif pada pilkada 2020 menimbulkan norma baru", Jurnal Adhasta Pemilu Vol.4 No.2 tahun 2021.
- Nur Rosihin Ana, "Sengketa Hasil Pilkada dari Masa ke Masa", Majalah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 168 Februari 2021.
- Rafi Hafizhudin dan Hade Afriansyah, Konsep Dasar Pengambilan Keputusan, Administrasi Pendidikan, Padang, 2019.
- Tim Peneliti Perludem, *Efektivitas Panwas: Evaluasi Pengawasan Pemilu 2004*, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Jakarta, 2006

SKRIPSI

- Rafika Maharani, "Analisis Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota Terhadap Penanganan Sengketa Proses Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Putusan Bawaslu Kabupaten Mamuju No.001/Ps.Reg/76/7604/lx/ 2020)", 2021
- Alan Saputra "Hukum tata Negara fakultas hukum universitas Hasanuddin, Kedudukan KPU terhadap Putusan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan umum." 2019.

ARTIKEL

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228>.

<https://gemasulawesi.com/pilkada-banggai-2020/>

<https://regional.kompas.com/read/2020/09/24/22503611/dinyatakan-tak-memenuhi-syarat-calon-petahana-di-pilkada-banggai-berencana?page=all>

<https://news.detik.com/berita/d-5211836/pencalonan-dibatalkan-kpu-kubu-bupati-og-an-ilir-aju-kan-gugatan-ke-ma>

<https://regional.kompas.com/read/2020/11/07/17030211/gugatan-dikabulkan-ma-pasl-on-petah-ana-ilyas-endang-kembali-jadi-peserta>

John Bouvier, 1856, A Law Dictionary, Adapted to the Constitution and Laws of the United States, <http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/recommendation>

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

Perbawaslu nomor 9 tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, Konsideran Menimbang huruf b dan Pasal 15 ayat (2)

PUTUSAN

Putusan Bawaslu Nomor : 002/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2021

KEPUTUSAN

Keputusan Nomor : 007/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/I/2021 Tentang Pembatalan Pasangan Calon peserta pemilihan walikota dan wakil walikota Bandar Lampung tahun 2020.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 63/PL.02.3-Kpt/7201/KPU-Kab/X/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 52/PL.02.3-Kpt/7201/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dan Daftar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai, Surat Nomot 125/HM.03-SD/7201/KPU-KAB/V/2020 Perihal Tindak Lanjut Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tanggal 12 Mei 2020

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 203/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/2020 tentang Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.

LAMPIRAN

Lampiran 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 1 P/PAP/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Kepala Daerah Bandar Lampung, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **Hj. EVA DWIANA, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cut Nyak Dien, Nomor 74, Lk. II, RT. 010, Kelurahan Palapa, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, pekerjaan Wiraswasta;
2. **Drs. DEDDY AMARULLAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Gg. Jarum, Lk. II, RT. 002 Kelurahan Bumi Jaya, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, pekerjaan Pensiunan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., L.L.M., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Tim Advokasi Eva-Deddy, beralamat di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2021;

Pemohon;

Lawan

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG, tempat kedudukan di Jalan Pulau Sebesi Nomor 90, Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;


Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Fransiskus Handrajadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *Law Office DRN & Partners*, beralamat di Jalan Mawar Indah Nomor 29A, Labuhan Dalam, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 058/PY.02.1-SU/1871/KPU-Kot/1/2021, tanggal 18 Januari 2021;

Termohon;

Halaman 1 dari 103 halaman. Putusan Nomor 1 P/PAP/2021

Lampiran 2

SALINAN PUTUSAN



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

PUTUSAN

NOMOR: 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung telah menerima penyampaian laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM yang disampaikan oleh:

Nama : YOPI HENDRO, S.H, M.H
Umur : 33 tahun
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jl. Karya Bakti S. Harapan LK. II RT/RW
010/000 Kel. Rajabasa Jaya Kec. Rajabasa
Kota bandar Lampung
Nomor Telp/HP : 0812.7226.3456

Dengan surat laporan tanggal 9 Desember 2020 telah diterima dan diperbaiki laporan tertanggal 17 Desember 2020 memberikan kuasa khusus tertanggal 09 Desember 2020 oleh kuasa hukumnya Ahmad Handoko, S.H., M.H, Yeni Wahyuni, S.H., M.H, Poppy Iriani, S.H., M.H, Novia Anggraini Lt, S.H.,M.H, R. Ananto Pratomo, S.H, Herwanto, S.H.,M.H, Tomi Samanta, S.H., Zainal Rachman, S.H.,M.H, Rezki Wirmandi, S.H, Dina Adhareni, S.H.,M.H, Gunawan, S.H.,M.H.,Cil, Hendra Wijaya, S.H.,M.H Adalah Para Advokat Dan Konsultan Hukum Pada Tim Advokasi Yutuber Yang Beralamat Di Jalan Sultan Agung No.17b - Labuhan Ratu Bandar Lampung Dan tambahan Kuasa Khusus tertanggal

Halaman
1 dari 240

